

### III. KEMISKINAN DI SUMBER JAYA

Pada tahun 2004 ICRAF melakukan survey rumah tangga di Lewi Monyet desa Simpang Sari, dengan jumlah responden sebanyak 30 orang. Dari hasil survey tersebut terlihat bahwa pendapatan per kapita per hari adalah Rp. 4,636.- atau setara dengan 0.52 dollar Amerika. Bila dibandingkan dengan garis kemiskinan internasional yaitu penduduk miskin adalah bila pendapatan per kapita per hari kurang dari 1 dolar Amerika, maka penduduk di Lewi Monyet ini termasuk dalam katagori miskin.

Ketergantungan penduduk terhadap sektor pertanian sebagai sumber pendapatan adalah sangat besar yaitu sebesar 85 persen yang berasal dari hasil budidaya (70%), tenaga kerja upahan (13%) dan airnya (2%). Hasil dari kebun kopi merupakan penyumbang terbesar dari total pendapatan yaitu sebesar 55%. Dari hasil survey tersebut juga terlihat bahwa ketergantungan petani pada lahan di kawasan hutan negara sangat tinggi yaitu pendapatan dari kopi di hutan negara adalah sebesar 41% dan pendapatan dari padi di hutan negara adalah sebesar 6%.

Petani yang tergolong miskin tersebut sebenarnya mengelola kebun kopi di kawasan hutan negara dengan sistem campuran atau kopi mulistrata. Kopi ditanam dengan bermacam-macam pohon kayu-kayuan dan pohon buah-buahan. Dengan sistim campuran ini, dapat mengurangi erosi

### IV. MEKANISME IMBALAN JASA LINGKUNGAN DI SUMBERJAYA

Rupes program melakukan "action research" di Sumberjaya untuk membangun mekanisme imbalan jasa lingkungan di Sumberjaya. Ada tiga mekanisme imbalan jasa lingkungan yang mungkin dapat dilaksanakan di daerah Sumberjaya.

#### 1. Pemberian Hak Atas Tanah

Seperti digambarkan diatas bahwa sebagian besar dari wilayah di Sumberjaya adalah terletak di kawasan hutan lindung. Usaha yang telah dilakukan oleh Dinas Kehutanan melalui program pengutanan kembali di waktu yang lampung dirasakan kurang berhasil, malahan memicu konflik sosial yang lebih tajam. Salah satu alternative usaha konservasi di kawasan hutan lindung dengan mengembangkan konsep *kebun lindung*. ICRAF mendefinisikan kebun lindung adalah sebagai sistem penggunaan lahan berbasis pohon dikelola oleh masyarakat, yang dapat menambah pendapatan dan memberikan layanan lingkungan yang sama dengan yang diberikan oleh hutan. Fungsi lindung hutan yang dapat diperoleh dari kebun baik sebagian maupun keseluruhan adalah fungsi konservasi air, tanah, cadangan karbon dan keragaman hayati (van Noordwijk et al, 2004). Praktek kebun lindung sudah lama dilaksanakan, namun konsep kebun lindung menjadi topik hangat akhir-akhir ini karena kebun lindung merupakan salah satu solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah konflik sosial antara masyarakat sekitar hutan dengan Dinas Kehutanan.

Tabel 1. Pendapatan Petani Leuwi monyet, Sumber Jaya, Tahun 2004

Sources of Income	Pendapatan Rumah Tangga Per tahun		Pendapatan Per Kapita per Hari
	Rupiah	%	Rupiah
A. Pertanian			
Kopi di hutan negara	2,732,748	41	688,350
Kopi di lahan marga	908,467	14	228,833
Kopi dari menyakap	0	0	0
Padi di hutan negara	411,493	6	103,651
Padi di lahan marga	0	0	0
Padi dari menyakap	25,562	0	6,439
Lainnya	623,767	9	157,120
B. Bukan Pertanian	645,933	10	162,704
C. Upah			
Pertanian	874,250	13	220,214
Bukan pertanian	225,000	3	56,675
d. Lainnya			
Kiriman/hadiah	130,667	2	32,914
Lahan yang disakapkan	140,167	2	35,307
e. Pendapatan per tahun	6,718,054	100	1,692,205
F. Pendapatan per hari	18,507		4,636

Pemberian hak kelola atas tanah di kawasan hutan lindung melalui program kehutanan kemasyarakatan atau HKM dapat dipandang sebagai suatu mekanisme pemberian imbalan kepada masyarakat miskin. Dalam program HKM, hak pengelolaan diberikan pertama selama 3-5 tahun yang merupakan hak sementara atau percobaan. Apabila kelompok yang telah mendapatkan hak HKM sementara ini mampu memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan maka hak pengelolaan atas tanah akan diperpanjang menjadi 25 tahun.

Petani HKM diharuskan untuk menanam kebun kopi campuran dengan jumlah tanaman kayu non kopi sebanyak 400 pohon per hektar dengan komposisi 70% pohon buah-buahan dan 30% pohon kayu-kayuan. Disamping itu mereka diharuskan ikut menjaga hutan alam yang masih ada dan tidak dibolehkan untuk membuka hutan untuk kebun kopi baru. Mereka juga diharuskan untuk melakukan teknik-teknik konservasi seperti terasing, guludan dan rorak.

Persyaratan untuk memperoleh HKM adalah mereka harus mempunyai kelompok tani yang sudah memiliki aturan-aturan kelompok, membuat proposal yang berisi rencana kerja dan juga harus memiliki peta dari areal yang diminta.

Untuk Kabupaten Lampung Barat, diperkirakan sekitar 40,000 ha lahan di kawasan hutan yang sudah terdegradasi dapat dijadikan areal HKM, tetapi saat ini baru sekitar 2,000 ha saja yang sudah mendapat ijin HKM. Kesulitan dalam membuat peta partisipatory dan proposal merupakan hambatan utama bagi kelompok tani yang ingin mengajukan permohonan ijin HKM. RUPES proyek akan membantu kelompok-kelompok tani tersebut dalam usaha untuk memperoleh ijin HKM.

## 2. Pembayaran atas meningkatnya kualitas air

Masyarakat di daerah hilir di Sumberjaya merupakan pemakai air untuk keperluan rumah tangga mereka. Umumnya mereka menggunakan air dari sumur, dari gunung yang dialirkan melalui pipa-pipa secara swadaya, dan dari sungai. Kualitas air yang digunakan oleh masyarakat tersebut dipengaruhi oleh kegiatan pertanian di daerah hulu.

Umumnya masyarakat pengguna air ini mengeluhkan masalah kurangnya ketersediaan air di waktu musim kemarau dan masalah kekeruhan di musim penghujan. Usaha-usaha mengurangi kekeruhan dapat dilakukan dengan penanaman pohon-pohon yang mempunyai perakaran yang dapat mengurangi erosi air, juga dapat dilakukan penanaman di daerah sepanjang aliran sungai atau *riparian*.

Dalam mekanisme ini penyedia dan pemanfaat jasa lingkungan dapat jelas diidentifikasi. Tetapi keberselesaian masyarakat pemanfaat air untuk membayar jasa lingkungan dan bagaimana mekanisme pembayarannya masih perlu diteliti lebih lanjut. Untuk menunjang hal tersebut ICRAF melakukan penelitian dan pelatihan dalam monitoring air bersih oleh masyarakat.

## 3. Pembayaran atas meningkatnya kualitas sungai way besai

Mekanisme ketiga yaitu dengan melihat bahwa PLTA adalah pengguna air yang cukup nyata. Saat ini masalah kekeruhan, enceng gondok dan sampah di sepanjang sungai Way Besai merupakan masalah yang cukup serius dan menimbulkan biaya-biaya untuk mengatasinya.

Dari diskusi informal dengan pihak PLTA, tampaknya ada kebersediaan bagi PLTA untuk memberikan imbalan kepada kelompok-kelompok petani yang memberikan jasa lingkungan yaitu meningkatnya kualitas dari sungai Way Besai.

Saat ini WATALA, yang merupakan partner dalam proyek RUPES, sedang melakukan penjangkauan untuk membentuk kelompok peduli sungai. Diharapkan dengan partisipatory aktif dari masyarakat dapat terbentuk rencana kegiatan yang nyata dan dapat didukung oleh PLTA.

## V. SIMPULAN

Imbalan jasa lingkungan bagi masyarakat miskin merupakan pendekatan baru dalam usaha meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus untuk mensejahterakan masyarakat di sekitar hutan.

Dari penelitian yang dilakukan oleh RUPES proyek di Sumberjaya, tergambar bahwa masyarakat hulu di Sumberjaya masih tergolong miskin dengan pendapatan per kapita kurang dari satu dolar Amerika per hari.

Masyarakat miskin ini telah melakukan pengelolaan lahan yang lebih lestari dengan sistim kebun lindung yaitu kebun kopi campuran atau multistrata.

Pemberian hak kelola atas lahan di kawasan hutan lindung melalui program HKm adalah salah satu mekanisme imbalan jasa lingkungan yang telah dilakukan. Namun demikian jumlah areal HKm masih sangat kecil yaitu hanya kurang dari 5 % dari total hutan rusak di Kabupaten Lampung Barat.

Mekanisme lainnya, yang belum dilaksanakan tetapi berpotensi untuk dilaksanakan yaitu pembayaran atas peningkatan kualitas air untuk keperluan rumah tangga, dan kualitas air sungai untuk keperluan PLTA.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat. 2002. *Sumberjaya Dalam Angka 2002*. Kabupaten Lampung Barat
- Pradhan, M., A. Suryahadi, S. Sumarto, L. Pritchett. 2000. *Measurements of Poverty in Indonesia: 1996, 1999, and Beyond*. Social Monitoring and Early Response Unit Working Paper June 2000.  
<http://www.smeru.or.id/report/workpaper/measurement/measbeyond.pdf>
- Suyanto. S, Beria Leimona, Rizki Pandu Permana and Fiona Chandler. 2004. *Review of The Development environmental services Market in Indonesia.. World Agroforestry Center – South East Regional Office* November 2004
- Verbist, B., Andree Eka Dinata Putra, dan Suseno Budidarsono. 2004. *Penyebab Alih Guna Lahan dan Akibatnya Terhadap Fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS) pada Lansekap Agroforestry Berbasis Kopi di Sumatra*. Agrivita vol 26 no 01. hal 1-8.
- Van Noordwijk, M. Agus, F., Suprayogo, D., Hairah, K., Pasya, G., Verbist, B., and Farida. 2004. *Peranan Agroforestri dalam mempertahankan fungsi hidrologi daerah aliran sungai (DAS)*. Agrivita vol 26 no 01. hal 1-8.